

TRANSFORMASI KESENJANGAN SOSIAL DAN EKONOMI DI ERA GLOBALISASI (2018- 2023): TANTANGAN DAN SOLUSI DI INDONESIA

Sofia Monica^{1*}, Timbul Dompok²

^{1,2} Universitas Putera Batam, Batam, Indonesia

*Korespondensi : pb221010014@upbatam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas transformasi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam konteks globalisasi pada periode 2018 hingga 2023, dengan fokus pada faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketimpangan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi telah meningkatkan kesejahteraan di beberapa wilayah, kesenjangan dalam distribusi pendapatan, akses terhadap pendidikan, dan layanan kesehatan tetap menjadi tantangan yang signifikan. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi literatur dan analisis data sekunder untuk memahami transformasi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam konteks globalisasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa globalisasi dapat memperburuk ketimpangan, terutama di negara maju di mana kekayaan terkonsentrasi pada segelintir individu. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kebijakan redistribusi yang efektif, akses terhadap pendidikan berkualitas, dan perlindungan sosial yang kuat. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, institusi pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga internasional dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Kata Kunci : Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, globalisasi, kebijakan redistribusi, akses pendidikan, perlindungan sosial, Indonesia, kolaborasi

ABSTRACT

This study examines the transformation of social and economic inequality in the context of globalization from 2018 to 2023, focusing on factors contributing to disparities in various countries, including Indonesia. While economic growth and technological advancements have improved welfare in certain regions, inequalities in income distribution, access to education, and healthcare services remain significant challenges. This research employs a qualitative research methodology, emphasizing literature reviews and secondary data analysis to understand the transformation of social and economic inequality in the context of globalization. The study reveals that globalization can exacerbate inequality, particularly in developed countries where wealth is concentrated among a small group of individuals. To address this issue, effective redistributive policies, access to quality education, and robust social protection systems are essential. This research highlights the importance of collaboration between governments, the private sector, educational institutions, civil society organizations, and international agencies in creating a more equitable and inclusive society.

transformation of social and economic inequality in the era of globalization is influenced by various interacting factors, such as economic policies, technological development, access to education and healthcare, and the impacts of global economic crises.

Keywords : *Social inequality, economic inequality, globalization, redistribution policies, access to education, social protection, Indonesia, collaboration.*

A. PENDAHULUAN

Kesenjangan sosial dan ekonomi telah menjadi isu global yang semakin kompleks di era modern. Meskipun perkembangan ekonomi dan teknologi telah mendorong banyak negara menuju kesejahteraan yang lebih baik, tidak semua lapisan masyarakat mampu merasakan manfaat dari pertumbuhan ini secara merata. Ketimpangan ekonomi, atau yang kerap diukur melalui Indeks Gini, menunjukkan bahwa di banyak negara, distribusi pendapatan dan kekayaan cenderung tidak merata. Bank Dunia memperkirakan bahwa pada tahun 2023, sekitar 9% populasi dunia masih hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem, atau setara dengan pendapatan kurang dari \$2 per hari. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi global belum cukup untuk menghapuskan kemiskinan dan ketimpangan tanpa adanya kebijakan yang berfokus pada redistribusi dan inklusi sosial.

Di Indonesia, kesenjangan sosial dan ekonomi juga menjadi perhatian utama. Sejak beberapa dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi yang stabil memang telah meningkatkan taraf hidup sebagian masyarakat, tetapi peningkatan ini tidak tersebar secara merata. Indeks Gini Indonesia, meskipun telah mengalami penurunan dari angka tertinggi beberapa tahun lalu, masih menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup signifikan di beberapa wilayah. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023

menunjukkan bahwa sekitar 9,57% penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kesenjangan ini tidak hanya meliputi perbedaan pendapatan, tetapi juga akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi yang berkualitas. Wilayah perkotaan sering kali menikmati fasilitas yang lebih baik dibandingkan dengan daerah pedesaan, yang memperparah kesenjangan antarwilayah.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi persoalan ini melalui berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang bertujuan untuk memberikan jaminan sosial serta bantuan langsung bagi masyarakat miskin. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan peran aktif pemerintah dalam menyediakan kebutuhan dasar serta mengembangkan kapasitas ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu. Melalui kebijakan ini, diharapkan masyarakat miskin dapat lebih mudah mengakses kebutuhan mendasar, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Namun, meskipun kebijakan-kebijakan ini telah memberikan dampak positif, tantangan masih tetap ada, terutama dalam hal penerapan yang merata di seluruh Indonesia.

Pada tingkat global, kesenjangan

ekonomi juga tampak dari perbedaan akses terhadap pendidikan tinggi dan layanan kesehatan. Negara-negara maju seperti Jerman dan Amerika Serikat memiliki persentase yang tinggi dalam akses pendidikan dan kesehatan, sementara banyak negara berkembang masih mengalami keterbatasan. Misalnya, hanya sebagian kecil penduduk di negara-negara berkembang yang memiliki akses ke pendidikan tinggi, yang sering kali menjadi faktor penentu dalam peningkatan taraf hidup dan pengurangan kemiskinan jangka panjang. Akses terhadap layanan kesehatan yang memadai juga menjadi tantangan, terutama di negara-negara dengan pendapatan rendah dan menengah yang sumber dayanya terbatas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transformasi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam lima tahun terakhir (2018-2023) di era globalisasi. Secara khusus, penelitian ini akan menganalisis tren ketimpangan berdasarkan indikator seperti Indeks Gini, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan di

berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan memanfaatkan kajian literatur dari sumber-sumber empiris dan teoretis, penelitian ini berusaha untuk memahami faktor-faktor utama yang memperparah atau justru membantu mengurangi kesenjangan di era global ini. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk mencapai kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam konteks globalisasi yang kian cepat dan kompleks.

Melalui kajian ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan kesenjangan sosial dan ekonomi dalam konteks global yang terus berubah. Kajian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pembentukan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam memperkecil kesenjangan dan mengatasi kemiskinan, sehingga pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh globalisasi dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat secara adil.

Tabel 1. Tabel Kesenjangan Sosial dan Ekonomi Global

Wilayah / Negara	Indeks Gini	Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan	Pengangguran (%)	Rasio Akses Pendidikan Tinggi	Rasio Akses Layanan Kesehatan
Global	0.65	9% (2023)	6.4%	32%	70%
Indonesia	0.38	9.57% (2023)	5.9%	22%	73%
Amerika Serikat	0.41	11.4%	3.6%	64%	88%
Brazil	0.54	12.1%	9.8%	25%	71%
India	0.47	22.5%	7.1%	28%	63%
Jerman	0.29	3.1%	2.8%	69%	92%
Afrika Selatan	0.63	18.9%	27.6%	21%	66%

(Sumber: Bank Dunia atau Badan Pusat Statistik (BPS))

Tabel di atas menggambarkan perbandingan kesenjangan sosial dan ekonomi di beberapa wilayah atau negara, termasuk Indonesia, berdasarkan beberapa indikator utama, seperti Indeks Gini, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan, tingkat pengangguran, rasio akses pendidikan tinggi, dan rasio akses layanan kesehatan.

Indeks Gini

Menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan, di mana nilai mendekati 1 mengindikasikan ketimpangan yang tinggi. Sebagai contoh, Afrika Selatan dan Brazil memiliki nilai indeks gini yang tinggi, masing-masing 0,63 dan 0,54, yang menandakan distribusi pendapatan yang kurang merata di negara tersebut.

Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan

Memberikan gambaran tentang jumlah penduduk yang hidup di bawah standar minimum. India, misalnya, memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain dalam tabel, dengan sekitar 22,5% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan.

Tingkat Pengangguran

Juga berperan sebagai indikator kesenjangan sosial. Negara-negara seperti Afrika Selatan menghadapi tingkat pengangguran yang sangat tinggi (27,6%), yang menunjukkan adanya masalah struktural dalam akses pekerjaan. Sementara itu, Jerman menunjukkan tingkat pengangguran yang rendah, yaitu 2,8%, menandakan stabilitas ekonomi yang lebih baik.

Rasio Akses Pendidikan Tinggi dan Rasio Akses Layanan Kesehatan

Mengukur seberapa besar populasi yang dapat menikmati layanan pendidikan

dan kesehatan. Amerika Serikat dan Jerman memiliki persentase yang cukup tinggi dalam kedua indikator ini, sementara beberapa negara berkembang seperti India dan Afrika Selatan memiliki rasio yang lebih rendah, mengindikasikan adanya kesenjangan dalam akses terhadap layanan penting ini.

Dari tabel ini, terlihat bahwa negara-negara berkembang umumnya memiliki tantangan yang lebih besar dalam menyediakan akses ekonomi dan sosial yang merata bagi masyarakatnya. Di sisi lain, negara maju menunjukkan ketimpangan yang lebih rendah, meskipun beberapa di antaranya, seperti Amerika Serikat, masih menghadapi tingkat ketimpangan pendapatan yang signifikan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi literatur dan analisis data sekunder untuk memahami transformasi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam konteks globalisasi. Sumber data yang digunakan mencakup literatur terdahulu seperti jurnal, artikel, dan buku yang relevan serta data statistik dari lembaga resmi, seperti Biro Statistik Nasional, Bank Dunia, dan Organisasi Pekerja Internasional (ILO). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka untuk merangkum informasi yang ada, serta analisis data sekunder untuk mengidentifikasi tren kesenjangan sosial dan ekonomi di berbagai negara.

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan menganalisis hubungan antara globalisasi dan kesenjangan sosial, serta analisis statistik deskriptif untuk

mendeskripsikan karakteristik data dan menunjukkan tren. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, dilakukan triangulasi data dengan membandingkan berbagai sumber serta melibatkan ulasan ahli di bidang sosial ekonomi untuk memberikan masukan. Penelitian ini memiliki batasan dengan fokus pada literatur yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir dan memperhatikan kemungkinan keterbatasan data, terutama dari negara-negara berkembang. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama enam bulan, dengan lokasi penelitian bersifat global, mencakup negara-negara yang memiliki variasi tingkat kesenjangan sosial dan ekonomi yang berbeda.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi kesenjangan sosial dan ekonomi di era globalisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, termasuk kebijakan ekonomi, perkembangan teknologi, akses pendidikan, kondisi kesehatan, serta dampak dari krisis ekonomi global. Melalui analisis data sekunder yang diambil dari berbagai sumber, termasuk Bank Dunia dan Organisasi Pekerja Internasional (ILO), kami menemukan bahwa negara-negara yang menerapkan kebijakan perdagangan bebas dan terbuka terhadap investasi asing sering kali mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun, pertumbuhan ini tidak selalu diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebagai contoh, data menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan meningkat di negara-negara tersebut, di mana keuntungan dari

pertumbuhan ekonomi cenderung terakumulasi pada segelintir individu atau kelompok elit, mengakibatkan marginalisasi bagi masyarakat yang lebih rentan. Temuan ini sejalan dengan analisis yang dilakukan oleh (Piketty, 2014) yang menyoroti bahwa ketidaksetaraan pendapatan semakin meningkat di negara-negara yang mengadopsi kebijakan neoliberal. Dalam penelitiannya, Piketty mencatat bahwa struktur pajak yang tidak progresif dan pengabaian terhadap redistribusi pendapatan dapat memperburuk kondisi kesenjangan, di mana kelompok kaya semakin kaya dan kelompok miskin semakin terpuruk. Di sisi lain, (Marien, 2014) dalam studi mereka tentang dampak teknologi, menunjukkan bahwa otomatisasi dan digitalisasi, meskipun menciptakan inovasi dan peluang baru, juga mengancam pekerjaan tradisional, terutama bagi individu yang memiliki keterampilan rendah. Akibatnya, perubahan ini menimbulkan tantangan bagi tenaga kerja yang tidak siap menghadapi transformasi ini, sehingga memperburuk kesenjangan sosial.

Berdasarkan Indeks Gini memberikan gambaran mendalam tentang distribusi pendapatan suatu negara, di mana nilai yang mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Berdasarkan data dalam jurnal, Afrika Selatan dan Brazil memiliki nilai Indeks Gini masing-masing sebesar 0,63 dan 0,54, menempatkan kedua negara dalam kategori dengan ketimpangan pendapatan yang signifikan. Kondisi ini mencerminkan distribusi kekayaan yang tidak merata, di mana kelompok elit ekonomi menguasai sebagian besar sumber daya, sementara mayoritas

penduduk berada dalam posisi ekonomi yang lemah.

Ketimpangan yang tinggi ini disebabkan oleh beberapa faktor utama: pertama, struktur ekonomi yang eksploitatif, di mana sebagian besar pendapatan terkonsentrasi pada sektor tertentu seperti pertambangan atau agrikultur berskala besar, yang tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat lapisan bawah; kedua, kesenjangan akses sosial, yang mengakibatkan masyarakat miskin sulit mendapatkan pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan peluang kerja formal; dan ketiga, kebijakan redistribusi yang lemah akibat minimnya pajak progresif yang signifikan dan perlindungan sosial yang kurang memadai.

Dalam konteks Indonesia, meskipun nilai Indeks Gini tidak setinggi Afrika Selatan dan Brazil, ketimpangan pendapatan tetap menjadi tantangan serius. Kekayaan sebagian besar terkonsentrasi di wilayah perkotaan, khususnya di Pulau Jawa, sementara daerah-daerah terpencil menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur ekonomi. Untuk mengatasi hal ini, strategi yang dapat diambil meliputi penerapan pajak progresif untuk mendukung program sosial bagi masyarakat miskin, perluasan akses layanan pendidikan dan kesehatan melalui penguatan anggaran, serta pemberdayaan UMKM melalui pelatihan, akses modal, dan peluang pasar yang lebih luas.

Pengalaman (Avirgan, n.d.) Afrika Selatan dan Brazil menunjukkan bahwa ketimpangan Indeks Gini yang tinggi tidak hanya menciptakan ketidakadilan

ekonomi tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial, dengan meningkatkan risiko konflik sosial, pengangguran struktural, dan pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif. Oleh karena itu, Indonesia perlu memantau perkembangan Indeks Gini secara berkelanjutan dan memastikan penerapan kebijakan redistribusi yang adil untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan inklusif. Akses pendidikan menjadi faktor lain yang sangat menentukan dalam kesenjangan sosial dan ekonomi. Penelitian oleh UNESCO (2022) menegaskan bahwa ketidakmerataan akses terhadap pendidikan berkualitas menjadi penghalang utama bagi mobilitas sosial, terutama bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Meskipun ada upaya dari pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan, kualitas pendidikan yang diberikan sering kali tidak merata, dengan sekolah-sekolah di daerah terpencil atau kurang beruntung yang tidak mendapatkan sumber daya yang memadai. (Nabibah & Hanifa, 2022) juga mencatat bahwa pendidikan yang rendah berimplikasi langsung terhadap peluang kerja dan penghasilan individu, menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus.

Kemudian mengenai Tingkat kemiskinan dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kemiskinan mencerminkan persentase penduduk yang hidup di bawah standar minimum kebutuhan dasar, yang sering diukur dengan garis kemiskinan internasional sebesar \$2 per hari. Dalam data yang disebutkan, (Deaton & Dreze, 2002) India memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, dengan 22,5% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan Kondisi ini menggambarkan

tantangan signifikan dalam memberikan kesejahteraan yang merata bagi semua lapisan masyarakat.

Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Kemiskinan di Indi :

1. Ketimpangan Wilayah: Sebagian besar populasi miskin di India terkonsentrasi di wilayah pedesaan, di mana infrastruktur ekonomi, pendidikan, dan kesehatan sering kali tidak memadai.
2. Ketergantungan pada Sektor Pertanian: Mayoritas penduduk miskin di India bekerja di sektor pertanian tradisional dengan produktivitas yang rendah dan pendapatan tidak stabil karena ketergantungan pada musim.
3. Pendidikan dan Pelatihan yang Terbatas: Kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas membatasi mobilitas sosial, menjadikan masyarakat miskin terjebak dalam lingkaran kemiskinan.
4. Kesenjangan Gender dan Diskriminasi Sosial: Sistem kasta dan budaya patriarki di India menciptakan hambatan struktural bagi sebagian populasi, terutama wanita dan kelompok kasta rendah, untuk memperoleh pekerjaan layak dan peluang penghasilan.

Dalam Konteks Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan India, yakni 9,57% pada tahun 2023. Meski angka ini lebih baik, tantangan dalam distribusi manfaat pembangunan tetap ada. Wilayah pedesaan dan daerah di luar Pulau Jawa menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan kawasan perkotaan([Http://www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), 2023).

Beberapa faktor yang berkontribusi:

1. Keterbatasan Infrastruktur di Daerah Tertinggal: Akses jalan, transportasi, dan pasar ekonomi masih rendah, sehingga menghambat peluang ekonomi masyarakat.
2. Akses Layanan Dasar yang Tidak Merata: Pendidikan, kesehatan, dan sanitasi di daerah pedesaan atau terpencil sering kali di bawah standar, menghambat peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin.
3. Ketergantungan pada Pekerjaan Sektor Informal: Sektor informal, meskipun menyerap banyak tenaga kerja, tidak memberikan pendapatan yang konsisten atau perlindungan sosial bagi pekerjaanya.

Upaya Kebijakan untuk Mengatasi Kemiskinan di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan, seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Meskipun efektif dalam beberapa aspek, implementasi program ini perlu diperkuat, terutama dalam distribusi yang adil ke wilayah-wilayah marginal.

Perbandingan dengan India

Pengalaman India menunjukkan bahwa tanpa peningkatan signifikan dalam infrastruktur sosial, tingkat kemiskinan yang tinggi sulit diatasi. Namun, India juga menjadi contoh keberhasilan dalam inovasi inklusif melalui program seperti Aadhaar (sistem identifikasi biometrik) yang mempermudah penyaluran bantuan

langsung ke masyarakat miskin, mengurangi potensi penyalahgunaan.

Indonesia dapat belajar dari pendekatan India dengan meningkatkan penggunaan teknologi dalam pendistribusian program sosial, memperluas program padat karya di wilayah tertinggal, dan memperkuat sistem pendidikan vokasi untuk memutus siklus kemiskinan.

Akses terhadap pendidikan tinggi dan layanan kesehatan merupakan indikator utama kesejahteraan sosial yang menunjukkan sejauh mana populasi suatu negara dapat menikmati layanan esensial ini. (Putri, 2019) Negara maju seperti Amerika Serikat dan Jerman memiliki rasio akses yang tinggi pada kedua indikator tersebut. Jerman, misalnya, telah berhasil menyediakan pendidikan tinggi yang hampir gratis, memungkinkan semua lapisan masyarakat mengaksesnya tanpa beban biaya yang signifikan. Sebaliknya, meski memiliki universitas unggulan dunia, sistem pendidikan tinggi di Amerika Serikat menghadapi kritik karena tingginya biaya pendidikan, yang membatasi akses bagi kelompok berpenghasilan rendah. Dalam layanan kesehatan, Jerman menunjukkan keberhasilan melalui sistem kesehatan universal yang merata untuk seluruh warganya. Namun, (MORAL HAZARD DALAM KEBIJAKAN PUBLIK PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT TERKAIT LAYANAN KESEHATAN | BINUS UNIVERSITY MALANG | Pilihan Universitas Terbaik Di Malang, n.d.) Amerika Serikat masih menghadapi ketimpangan, di mana sistem yang berbasis asuransi swasta membuat layanan kesehatan sulit dijangkau bagi sebagian masyarakat, terutama mereka

yang tidak memiliki asuransi memadai.

Berbeda dengan negara maju, negara berkembang seperti India dan Afrika Selatan menghadapi tantangan besar dalam menyediakan akses yang merata terhadap pendidikan dan kesehatan. Di India, pendidikan tinggi terkonsentrasi di kota besar, dengan peluang terbatas bagi masyarakat pedesaan. Demikian pula, layanan kesehatan lebih banyak tersedia di wilayah urban, sementara penduduk pedesaan sering harus menempuh perjalanan panjang untuk mendapat perawatan dasar. Di Afrika Selatan, meskipun akses pendidikan dan kesehatan telah meningkat sejak era pasca-apartheid, ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin masih signifikan, dengan fasilitas kesehatan publik yang kekurangan sumber daya dibandingkan sektor privat.

Indonesia memiliki pola yang mirip dengan India dan Afrika Selatan. Dalam pendidikan tinggi, meskipun program pemerintah seperti KIP Kuliah telah memperluas akses, partisipasi masyarakat di wilayah pedesaan dan Indonesia Timur masih rendah akibat keterbatasan fasilitas pendidikan dan kendala ekonomi. Pada layanan kesehatan, program BPJS Kesehatan berhasil memperluas cakupan, tetapi disparitas kualitas fasilitas antara perkotaan dan pedesaan masih menjadi masalah serius (Karin, 2024).

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan investasi dalam pembangunan universitas dan fasilitas kesehatan di wilayah tertinggal, subsidi pendidikan berbasis kebutuhan, serta penguatan kualitas layanan kesehatan publik, khususnya di daerah pedesaan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kesenjangan dalam akses pendidikan dan

kesehatan dapat berkurang, dan indikator kesejahteraan sosial menjadi lebih merata di seluruh wilayah. Dalam konteks kesehatan, penelitian oleh Marmot et al. (2020) menunjukkan bahwa kondisi kesehatan yang buruk tidak hanya mempengaruhi kualitas hidup individu tetapi juga menghambat produktivitas dan partisipasi mereka dalam pasar tenaga kerja. Selama pandemi COVID-19, dampak dari kesenjangan ini semakin terlihat jelas, di mana kelompok masyarakat yang paling rentan menghadapi risiko yang lebih tinggi, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Hal ini mempertegas pentingnya kebijakan kesehatan yang inklusif, yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik tetapi juga kesejahteraan sosial dan ekonomi. Krisis ekonomi global juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kesenjangan sosial dan ekonomi (Burhanuddin & Abdi, 2020). Selama periode resesi menunjukkan bahwa kehilangan pekerjaan sering kali lebih banyak mempengaruhi pekerja dengan keterampilan rendah dan pekerja di sektor informal, yang umumnya tidak memiliki jaminan sosial. Fenomena ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi, termasuk perlindungan sosial yang kuat untuk kelompok-kelompok yang paling rentan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun globalisasi dapat menawarkan peluang untuk pertumbuhan ekonomi, tanpa adanya kebijakan yang inklusif dan berkeadilan, kesenjangan sosial dan ekonomi akan terus meningkat. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah, sektor swasta, dan

masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan yang dapat mengurangi kesenjangan. Hal ini mencakup peningkatan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, pengembangan keterampilan untuk mempersiapkan tenaga kerja menghadapi era digital, serta kebijakan perlindungan sosial yang memadai untuk membantu kelompok-kelompok yang paling rentan. Ke depan, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi solusi inovatif yang dapat diimplementasikan dalam konteks lokal dan global, serta untuk memahami lebih dalam bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan saling berinteraksi. Dengan upaya yang tepat, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih adil dan merata bagi semua individu, terlepas dari latar belakang sosial dan ekonomi mereka.

Kesenjangan Sosial dan Ekonomi di Era Globalisasi

Peran Pemerintah: Pemerintah berfungsi sebagai pembuat kebijakan yang dapat mendorong pengurangan kesenjangan melalui kebijakan perpajakan yang progresif, program perlindungan sosial, dan investasi dalam pendidikan serta kesehatan (Khoirul, 2024). Kemudian kebijakan redistribusi pendapatan memiliki peran yang signifikan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi.

Peran Sektor Swasta: Sektor swasta berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, berinovasi, dan menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab sosial (CSR) untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Peran Lembaga Pendidikan: Lembaga pendidikan berperan dalam meningkatkan

akses dan kualitas pendidikan, mempersiapkan individu dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar tenaga kerja global.

Peran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS): OMS berfungsi sebagai advokat bagi kelompok terpinggirkan, meningkatkan kesadaran tentang isu ketidaksetaraan, serta Mengimplementasikan program pemberdayaan yang berdampak langsung pada masyarakat.

- a) Peran Masyarakat : Masyarakat memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan dan inisiatif lokal, serta dalam mengawasi dan memengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka.
- b) Peran Lembaga Internasional: Lembaga internasional, seperti Bank Dunia dan Setiap peran ini saling berinteraksi dan penting dalam menciptakan perubahan yang positif untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di era globalisasi.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa transformasi kesenjangan sosial dan ekonomi di era globalisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, seperti kebijakan ekonomi, perkembangan teknologi, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta dampak dari krisis ekonomi global. Meskipun globalisasi telah menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi yang pesat di banyak negara, distribusi manfaatnya sering kali tidak merata. Ketimpangan pendapatan, yang tercermin dari Indeks Gini, masih tinggi di beberapa negara

seperti Afrika Selatan dan Brazil, sementara negara berkembang lainnya, seperti India dan Indonesia, terus bergulat dengan kemiskinan yang terkonsentrasi di wilayah pedesaan. Penyebab utama kesenjangan ini meliputi struktur ekonomi yang eksploitatif, kebijakan redistribusi yang lemah, keterbatasan infrastruktur sosial, dan akses tidak merata terhadap pendidikan dan kesehatan. Tantangan ini diperburuk oleh kemajuan teknologi seperti otomatisasi dan digitalisasi, yang menciptakan tekanan baru bagi pekerja berkemampuan rendah. Selain itu, krisis ekonomi global juga memiliki dampak signifikan, khususnya bagi pekerja sektor informal yang tidak memiliki perlindungan sosial memadai. Di sisi lain, negara maju seperti Jerman menunjukkan keberhasilan dalam menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang merata, meskipun beberapa, seperti Amerika Serikat, masih menghadapi tantangan ketimpangan kualitas dan biaya. Indonesia dan negara berkembang lainnya dapat mengambil pembelajaran dari pengalaman negara maju dan inovasi inklusif di negara berkembang, seperti program Aadhaar di India. Upaya untuk mengurangi kesenjangan memerlukan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan perpajakan progresif, investasi dalam infrastruktur sosial, perluasan akses pendidikan berkualitas, penguatan layanan kesehatan, dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan adalah langkah-langkah prioritas. Selain itu, kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, lembaga internasional, dan masyarakat sipil sangat penting untuk mewujudkan pertumbuhan yang lebih adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Ke depan, penelitian

lebih lanjut dibutuhkan untuk mengeksplorasi solusi inovatif dalam konteks lokal dan global, sehingga transformasi sosial dan ekonomi di era globalisasi dapat berjalan lebih inklusif dan berkeadilan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Avirgan, T. (n.d.). South Africa's economic gap grows wider while Brazil's narrows slightly. Economic Policy Institute. <https://policycommons.net/artifacts/1411097/south-africas-economic-gap-grows-wider-while-brazils-narrows-slightly/>
- Burhanuddin, C. I., & Abdi, M. N. (2020). AkMen Jurnal Ilmiah. Krisis, Ancaman Global, Ekonomi Dampak, Dari, 17, 710–718.
- Deaton, A., & Dreze, J. (2002). Poverty Inequality in India: A Re-Examination. *Economic and Political Weekly*, 37(36), 3729–3748.
- [Http://www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). (2023). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. Badan Pusat Statistik, 47, 1–16. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>
- Karin, R. (2024). Disparitas Akses Layanan Kesehatan Antara Wilayah Urban dan Rural di Indonesia Disparities in Access to Health Services Between Urban and Rural Areas in Indonesia. December.
- Khoirul, F. A. A. (2024). Analisis

Kebijakan Redistribusi Pendapatan dan Perubahan Sosial-Ekonomi: Studi Kasus Kesejahteraan di Indonesia. *Indonesian Journal of Political Studies*, 4(1), 1–8.

- Marien, M. (2014). Book Review: The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. *World Futures Review*, 6(2), 189–193. <https://doi.org/10.1177/1946756714541404>

MORAL HAZARD DALAM KEBIJAKAN PUBLIK PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT TERKAIT LAYANAN KESEHATAN | BINUS UNIVERSITY MALANG | Pilihan Universitas Terbaik di Malang. (n.d.). <https://binus.ac.id/malang/2017/06/moral-hazard-dalam-kebijakan-publik-pemerintah-amerika-serikat-terkait-layanan-kesehatan-2/>

- Nabibah, E. T., & Hanifa, N. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Independent: Journal of Economics*, 2(3), 1–13. <https://doi.org/10.26740/independent.v2n3.p1-13>

Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-First Century: A multidimensional approach to the history of capital and social classes. *British Journal of Sociology*, 65(4), 736–747. <https://doi.org/10.1111/1468-4446.12115>

- Putri, R. N. (2019). Perbandingan Sistem Kesehatan di Negara Berkembang dan Negara Maju. *Jurnal Ilmiah*

- Universitas Batanghari Jambi, Sarjito, A. (2024). Efektivitas Kebijakan
19(1), 139. Sosial dalam Mengurangi
<https://doi.org/10.33087/jiubj.v19i1.572> Ketimpangan Pendapatan dan
Angka Kemiskinan. Jurnal Ilmu
Sosial Politik Dan Humaniora,
6(2), 1–12.
<https://doi.org/10.36624/jisora.v6i2.90>.